Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang
e-ISSN: 2775-9768 | p-ISSN: 2777-0974
Vol. 6 No. 2, Oktober 2026
hompage journal: https://journal.unespadang.ac.id/jaaip

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di BPPMHKP MANADO

Javier Yonathan Rondonuwu [1*], Susy Amelia Marentek [2], Belthasar Trito Siahaan [3]
[1] Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
[2] Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
[3] Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

***Coresponding author's email:** Javier Yonathan Rondonuwu javieryonathanrondonuwu@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam penyusunan laporan keuangan pada BPPMHKP Manado. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting agar informasi keuangan tersaji dengan tepat dan akurat. Sistem pengendalian intern pemerintah berperan penting dalam aktivitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam aktivitas penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di BPPMHKP Manado sudah berjalan dengan sesuai, namun masih perlu adanya perhatian mengenai penanganan risiko yang berkelanjutan dan konsisten dengan menjalankan seluruh pengelolaan risiko yang sudah ada, serta komunikasi dan saling koordinasi lebih ditingkatkan.

Abstract: *This study aims to analyze the government's internal control system (SPIP) in the preparation of financial statements at BPPMHKP Manado. The preparation of financial statements is important so that financial information is presented appropriately and accurately. The government's internal control system plays an important role in financial management activities, especially in financial report preparation activities. This research is a qualitative research with a descriptive method. This study uses three data collection techniques through interviews, observation and documentation. Based on the research conducted, the results show that the implementation of the government's internal control system in the preparation of financial statements at BPPMHKP Manado has been running appropriately, but there is still a need for attention to sustainable and consistent risk management by carrying out all existing risk management, as well as improved communication and mutual coordination.*

Artikel Histori
Direvisi: 08-09-2026
Diterima: 04-10-2026
Diterbitkan: 27-10-2026

Kata Kunci:
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah.

Keywords:
Goverment Internal Control System, Financial Statements, Goverment Accounting System.

PENDAHULUAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelatan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan unit kerja dibawah kementrian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dalam pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. BPPMHKP berperan penting dalam memastikan bahwa produk perikanan yang beredar telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Selain itu, BPPMHKP juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi, pengujian laboratorium, serta penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

Dalam menjalankan tugasnya BPPMHKP Manado sebagai salah satu perwakilan di daerah Sulawesi Utara memiliki kewajiban untuk Menyusun laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan tersebut menjadi salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan tertib, benar dan sesuai peraturan negara.

Dalam Praktiknya, penyusunan laporan keuangan di intansi pemerintah berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti kesalahan pencatatan, sistem yang sering gangguan,

DOI: https://doi.org/10.31933/gk0kc957
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

komunikasi antarbagian yang keterlambatan penyerahan dokumen transaksi, perbedaan pemahaman mengenai pencatatan, serta keterlambatan penyampaian informasi terkait dengan gangguan sistem. Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) dalam pengelolaan keuangan. Praktik pengendalian intern pada proses penyusunan laporan keuangan telah diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku, terotomatisasi melalui sistem informasi keuangan daerah, dan terdokumentasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian (Desti & Halim, 2021) yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman menemukan bahwa praktik pengendalian intern pada proses penyusunan laporan keuangan telah diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku, terotomatisasi melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan terdokumentasi. Namun, terdapat beberapa kelemahan yaitu belum adanya evaluasi pada pembinaan Sumber Daya Manusia dan pembatasan akses pada sistem informasi keuangan, serta kegiatan evaluasi yang belum menggunakan sistem informasi untuk memantau perkembangan tindak lanjut evaluasi secara otomatis. Penelitian oleh (A Heinrich1, 2023) juga yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menemukan bahwa peran pemerintah dalam mengatur regulasi terkait dengan SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi dianggap penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Secara umum, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SPIP dan dukungan teknologi menjadi faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam penyusunan laporan keuangan di BPPMHKP Manado. oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada penyusunan laporan keuangan di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Manado. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tentang bagaimana SPIP diterapkan pada BPPMHKP Manado dan menilai sejauh mana penerapan SPIP yang dilakukan terhadap penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Muslimah et al., 2023).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Deiana Suherlan et al., 2022).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam jurnal (Artedi & Trisyanto Surya, 2022) Merujuk pada PP No. 60 Tahun 2008 dan COSO Tentang SPI, Tujuan SPIP yaitu :

1. Dapat menjamin keyakinan yang memadai dalam tercapainya efektifitas dan efisiensi untuk pencapaian tujuan pemerintahan negara,
2. Memiliki keandalan dalam pelamporan keuangan,
3. Pengaman aset negara,
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut (Purwita Sari, 2021) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2012) terdapat lima unsur pengendalian intern, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian,
   Adalah lingkungan yang mencakup integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, tanggung jawab dan praktik sumber daya manusia.
2. Penilaian Risiko,
   Adalah pengendalian dengan memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi oleh setiap unit organisasi baik didalam maupun diluar organisasi.
3. Kegiatan Pengendalian,
   Merupakan bagian dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk pengelolaan sumber daya negara dalam mencapai tujuan yang efektif.
4. Informasi dan Komunikasi.
   Menyatakan bahwa kelancaran arus informasi dan komunikasi internal merupakan salah satu kunci untuk memastikan pengendalian internal yang efektif. Informasi harus ditangkap secara jelas dan dikomunikasikan secara bertanggung jawab.
5. Pemantauan,
   Merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan evaluasi terhadap pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan agar pengendalian intern dapat berjalan secara transparan.

Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut (Isnaen & Albastiah, 2021) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan ealisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatanya terhadap peraturan perudang-undangan PP No. 71, 2010.

Komponen Laporan Keuangan

Menurut (Alouw et al., 2025) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bersama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 menetapkan enam unsur pokok dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Hubungan SPIP dengan Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut (Siringoringo et al., 2024) Dalam konteks pemerintahan, terdapat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen utama dalam menjamin efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. SPIP merupakan serangkaian proses yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan PP No. 60 Tahun 2008.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan, terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelatan dan Perikanan (BPPMHKP).

Penelitian ini menggunakan data primerdan sekunder dalam mendukung pembahasan pada penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal literatur maupun buku literatur, dan dokumen pendukung lainnya seperti SOP. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Penelitian

ini juga menggunakan tiga teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Penyusunan Laporan Keuangan di BPPMHKP MANADO

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, SPIP yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada BPPMHKP Manado sudah berjalan dengan efektif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat dan diperbaiki seperti identifikasi risiko yang memadai tetapi penanggulanganya masih perlu diperhatikan, kesalahan pencatatan, kompetensi SDM yang belum merata, penggunaan sistem yang sering mengalami gangguan, komunikasi antarbagian yang belum berjalan efektif. Kendala tersebut dapat mempengaruhi dan menghambat proses penyusunan dan kualitas penyajian laporan keuangan pada BPPMHKP Manado. berikut ini adalah hasil penelitian dan hasil analisis mengenai sistem pengendalian internal pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di BPPMHKP Manado:

Lingkungan Pengendalian

Tabel 1. Analisis Komponen Lingkungan Pengendalian

No.	Aspek	Kondisi pada BPPMHKP Manado	Analisis	Kesesuaian
1	Integritas dan Etika	Seluruh proses pengelolaan keuangan dan pelaporan yang dilandasi dengan PP No. 94 Tahun 2021, PP No. 42 Tahun 2004, dan kode etik pegawai yang diatur dalam PMK No. 190/PMK.01.2018 dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.	Adanya aturan tersebut maka disiplin dan kode etik menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan atas penyusunan laporan keuangan secara efektif.	Integritas dan kode etik, pembagian tugas yang terstruktur, pengutamaan kompetensi pegawai, pimpinan yang aktif dalam menjalankan tanggung jawab sangat mendukung penerapan sistem pengendalian internal. Sehingga, SPIP pada lingkungan pengendalian sudah sesuai. Selain itu, BPPMKHP menetapkan kebijakan dengan mengutamakan kompetensi para pegawai serta adanya peran pimpinan yang aktif dalam memantau dan memberikan arahan. Namun, masih perlu adanya pemerataan kompetensi SDM secara berkelanjutan karena masih sering terjadinya perbedaan pendapat mengenai pencatatan dan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, lingkungan pengendalian dapat menunjang seluruh proses penyusunan laporan keuangan hingga penyajian yang dapat dipertanggung jawabkan.
2	Struktur Organisasi	Terdapat pembagian fungsi antara Kepala Balai/KPA, Subbag Umum/Tata usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintahh Membayar (PPSPM), Bendahara, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Pengelolan Keuangan.	BPPMHKP Manado menjukkan adanya pembagian fungsi dan tanggung jawab secara terstruktur sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan efektif karena tidak hanya dikerjakan oleh satu individu tetapi dengan tim satuan kerja.	
3	Pembagian tugas dan tanggung jawab	Penyusunan laporan keuangan dikerjakan dan dilaksankan secara berjenjang sesuai dengan masing-masing fungsi dan bekerja berdasarkan ketentuan dari PMK No.232/PMK.05/2022.	Pemisahaan tanggung jawab tentu membuat pekerjaan berjalan dengan efektif karena terdapat pihal yang melakukan penccatatan, pemeriksaan, persetujuan, dan pertanggung jawaban. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan pekerjaan.	
4	Komitmen terhadap Kompetensi	Pegawai yang diberikan tanggungg jawab dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan telah	BPPMHKP Manado berkomitmen dengan mengutamakan	

		memiliki kompetensi dengan bersertifikat resmi yang diterapkan Kemeterian Keuangan seperti Sertifikat Negara Tersertifikasi (SNT).	kompetensi pegawai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan dan menerapkan standard regulasi dari Kementerian Keuangan dengan mengadakan seleksi yang ketat.	
5	Peran Pimpinan	Pimpinan pada BPPMHKP Manado secara aktif memberikan arahan dan mengontrol jalannya lingkungan kerja dengan memberikan arahan melalui rapat internal rutin, dan media komunikasi seperti WhatsApp terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan peraturan baru.	Adanya arahan pimpinan tentu sangat menunjukkan perhatian terhadap pengendalian internal dan membantu pegawai memahami ketentuan yang harus diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.	

Berdasarkan tabel diatas, lingkungan pengendalian pada BPPMHKP Manado terlihat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya struktur organisasi serta pembagian tugas yang jelas sehingga pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan berjalan secara terstruktur.

Pemisahan tugas juga diterapkan dengan baik, yang mana KPA memiliki wewenang dalam memimpin satuan kerja, PPK bertugas pada aktivitas komitmen dan yang menimbulkan pengeluaran anggaran, PPSPM melakukan pengujian dan penerbitan SPM, dan bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas. Kemudian, BPPMHKP Manado berkomitmen terhadap kompetensi karena dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi terintegrasi seperti SAKTI sangat membutuhkan pemahaman mengenai prosedur serta ketentuan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Selain itu, dengan adanya peran aktif dari pimpinan dalam memberikan arahan kepada seluruh pegawai dapat mendukung lingkungan pengendalian internal yang positif dan seluruh proses penyusunan laporan keuangan dapat terlaksana dengan baik.

Penilaian Risiko

Tabel 2. Analisis Komponen Penilaian Risiko

No	Aspek	Kondisi Pada BPPHKP Manado	Analisis	Kesesuaian
1	Identifikasi Risiko	Terdapat beberapa risiko yang ditemukan dalam penyusunan laporan keuangan pada BPPMHKP Manado seperti, sering terjadi gangguan pada sistem SAKTI dan TTE karena ketidakstabilan koneksi internet, kesalahan pencatatan yang masih sering terjadi karena pemilihan kode akun pada posisi jurnal secara manual, keterlambatan dalam menyelesaikan transaksi bulanan atau triwulan, dan risiko yang terkait dengan rotasi pegawai yang membuat penurunan adaptasi karrena kurangnya pemahaman mengenai akuntansi akrual dan penggunaan aplikasi SAKTI.	Beberapa risiko yang terjadi pada balai tentu akan menghambat pencapaian tujuan. Namun, BPPMHKP Manado memiliki identifikasi risiko yang terstruktur. Jika risiko yang terjadi mengenai kesalahan pencatatan pada sistem, BPPMHKP Manado melakukan identifikasi pada sistem aplikasi SAKTI dengan beberapa jenis modul yang diguanakan tergantung dari jenis kesalahan pencatatan yang dilakukan, dan untuk risiko teknis dan SDM akan diidentifikasi melalui Kerangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk dideteksi.	Dengan identifikasi risiko yang dilakukan oleh BPPMHKP Manado sangat baik sehingga satuan kerja telah mengetahui beberapa risiko yang dapat menghambat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berbagai risiko yang bersifat teknis, kesalahan SDM, dan proses admnistrasi. SPIP yang diterapkan juga sudah sesuai namun masih perlu adanya tidak lanjut secara konsisten agar tidak terjadi risiko yang sama berulang.
2	Evaluasi Risiko	Evaluasi risiko dilakukan secara sistematis oleh beberapa pihak yaitu, pihak internal seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),	Adanya tindakan tersebut menunjukkan bahwa ada perhatian khusus dari	

		kemudian APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku inspektorat jenderal kementerian/lembaga, dan pihak eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	beberapa pihak dalam memperkuat pengendalian internal pada BPPMHKP Manado karena sangat membantu untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan pengendalian internal pada BPPMHKP Manado dan harus diperbaiki.
3	Mitigasi Risiko	Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko-risiko yang terjadi yaitu dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala, penerapan PIPK dalam menjalankan pengendalian internal yang memadai, peningkatan kompetensi SDM, menggunakan sistem aplikasi pemerintah, dan memastikan setiap bukti transaksi memiliki dokumen pendukung yang sah.	Tindakan mitigasi risiko ini dilakukan oleh BPPMHKP Manado dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan berulang yang berpotensi mrnghambat pencapaian tujuan dari instannsi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, BPPMHKP Manado telah melakukan identifikasi terhadap risiko yang dapat mempengaruhi penyusunan hingga penyajian laporan keuangan. Risiko yang sering terjadi bersifat teknis, operasional, pada sumber daya manusia (SDM).

Risiko teknis yang terjadi yaitu berkaitan dengan penggunaan SAKTI yang membutuhkan jaringan internet dan sangat bergantung pada server pusat. Gangguan jaringan tersebut sangat mengganggu aktivitas penginputan, penarikan data, serta penyusunan laporan keuangan. Kemudian, gangguan pada sistem tanda tangan elektronik juga dapat menyebabkan keterlambatan terhadap pengesahan dokumen.

BPPMHKP Manado juga memilki risiko operasional yang berkaitan dengan kesalahan pencatatan seperti kesalahan memilih kode akun, jurnal manual, dan kesalahan menginput data referensi. Hal tersebut membuat ketidaksesuaian data pada neraca percobaan dan akan menimbulkan saldo tidak wajar.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa terdapat risiko yang berhubungan dengan kompetensi pengawai. Sering terjadinya mutasi atau rotasi pegawai tanpa adanya serah terima data yang jelas yang mengakibatkan terdapat risiko seperti adanya pegawai yang belum paham terhadap perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pencegahan untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut secara berulang, BPPMHKP Manado berupaya dengan melakukan rekonsiliasi berkala untuk memastikan kesesuaian data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan aplikasi dan peningkatan koneksi jaringan yang stabil, dan penerapan tertib dokumen sumber.

Komponen penilaian risiko pada BPPMHKP Mando telah berjalan cukup efektif karena instansi mampu mengidentifikasi dan menganalisis bermacam-macam risiko dengan mengadakan langkah pencegahan, tetapi masih sering terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam mencatat transaksi, dan sumber daya manusia yang masih perlu dikendalikan

Kegiatan Pengendalian

Tabel 3. Analisis Komponen Kegiatan Pengendalian

No	Aspek	Kondisi Pada BPPMHKP Manado	Analisis	Kesesuaian
1	Pemisahan Tugas	Pemisahan tugas atas penyusunan laporan keuangan diterapkan pada BPPMHKP Manado diantaranya, Kuasa Pengguana Anggaran (KPA) sebagai pemimpin satker, menyusun DIPA, dan berwenang dalam menetapkan pejabat lainnya. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Lalu, Bendahara	BPPMHKP Manado menerapkan pemisahan tugas guna memastikan bahwa tidak ada satu individu yang mengerjakan seluruh proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sehingga mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kecurangan (*fraud*).	Adanya pembagian tugas yang jelas membuat pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan sangat efektif. Penggunaan sistem SAKTI memudahkan proses pencatatan hingga pelaporan berdasarkan tanggung jawab para pengguna. Verifikasi data

		Pengeluaran/Penerimaan bertanggung jawab dalam memegang usang dan melakukan pembayaran dan penerimaan.		dilakukan dengan merekonsiliasi data sebelum disajikan ke laporan keuangan. Perlindungan dokumen dan data elektronik yang ketat juga diterapkan dalam menjaga kerahasiaan data negara dan untuk menghindari ancaman dari kebocoran data. SPIP yang diterapkan sudah sesuai karena pemisahan tanggung jawab yang jelas, penggunaan sistem resmi, verifikasi data, serta keamanan dokumen dan data elektronik yang memadai. Unsur kegiatan pengendalian yang diterapkan juga membantu dalam mencegah terjadinya beberapa risiko dan membantu mengidentifikasi dalam penyusunan laporan keuangan.
2	Pencatatan transaksi	Pencatatan transaksi dilakukan oleh operator Satker dengan menginput data transaksi harian, baik penerimaan, pengeluaran, persediaan aset tetap hingga pencatatan bendahara ke dalam aplikasi SAKTI.	BPPMHKP menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi tingkat Instansi (SAKTI) dalam melakukan pencatatan transaksi, agar setiap kegiatan transaksi yang terjadi dapat terekam oleh sistem.	
3	Verifikasi Data	Verisfikasi data laporan dilakukan dengan mencocokkan data keuangan internal dan data transaksi pada Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) dan dilakukan secara konsisten menggunakan aplikasi Myintress untuk menjaga kesesuaian data. Verifikasi dilakukan sebelum data laporan keuangan dikirin ketingkat yang lebih tinggi.	Rekonsiliasi dilakukan sebagai bukti *double verification* yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ketidaksesuaian data sebelum laporan keuangan disetujui melalui penandatanganan oleh KPA dan di kirim ke jenjang yang lebih tinggi untuk diperiksa.	
4	Otorisasi	Keuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pimpinan tertinggi pada satuan kerja, sehingga KPA memiliki kewenangan dalam menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang sudah selesai.	BPPMHKP Manado memberikan otoritas tertinggi pada KPA sebagai pimpinan Satker sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran.	
5	Penggunaan SAKTI	Penggunaan Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) untuk mrncatat transaksi hingga penyusunan laoiran keuangan. aplikasi SAKTI hanya dapat digunakan oleh Operator (perekam data), Validator (pemeriksa), dan Approver (pemberi persetujuan).	BPPMHKP manado menggunakan aplikasi SAKTI sebagai sistem yang terintegrasi agar dapat memudahkan pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan. Pembatasan akses pada sistem juga sangat efektif karena berperan untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	
6	Keamanan Dokumen Keuangan dan Data Elektrtonik	BPPMHKP menerapkan kontrol akses, penggunaan aplikasi resmi seperti SAKTI, dan menggunakan enksripsi data. Dokumen seperti e-SPM dan SP2D dilindungi dengan menggunakan TTE yang tersumpah dari innstansi berwenang seperi BSSN/Lemsaneg. Dokumen keuangan diarsipkan secara digital, dilakukan pencadangan secara berkala dan disimpan terpisah di server resmi. Dokumen fisik pun disimpan di *filling cabinet* atau brankas. Keamanan pada perangkat komputer juga dikunci dan dupasang *software* anti virus dan *firewall* yang selalu diperbaharui. Edukasi mengenai kerahasiaan data negara juga diberikan kepada setiap pegawai dalam mencegah kebocoran informasi.	Pengaman yang dilakukan oleh BPPMHKP Manado sangat efektif dalam mencegah risiko kehilangan data atau dokumen, perubahan data, dan pembatasan akses yang dilakukan atas akses yang tidak sah terhadap data keuangan. Edukasi kepada SDM juga menjadi hal yang penting dalam menjaga kerahasiaan data.	

Kegiatan pengendalian pada BPPMHKP Manado menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan berjalan dengan efektif. Terlihat dari bentuk pengendalian utama yaitu pemisahan tugas yang terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, dan bendaraha yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda sehingga seluruh proses dijalankan dengan penuh tanggung jawab Satuan Kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Penggunaan aplikasi SAKTI merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pengendalian. Sistem ini membantu memudahkan pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan dan memudahkan untuk dideteksi. aplikasi SAKTI hanya diberikan akses bagi Operator sebagai perekam data, Validator sebagai pemeriksa, dan Approver sebagai pemberi persetujuan. Hal tersebut dilakukan agar supaya tidak ada akses yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengendalian juga diperkuat melalui proses pemeriksaan dan persetujuan. Petugas menyusun laporan keuangan melakukan kompilasi data, input data melalui SAKTI, dan dilakukan *review* awal. Lalu, laporan keuangan akan disetujui oleh KPA sebelum diperiksa oleh pihak inspektorat dan eksternal.

Keamanan dokumen dan data keuangan yang diterapkan oleh BPPMHKP Manado melalui pembatasan akses, penggunaan aplikasi resmi, tanda tangan elektronik, pengamanan dokumen fisik, dan pencadangan data yang dilakukan secara berkala.

Informasi dan Komunikasi

Tabel 4. Analisis Komponen Informasi dan Komunikasi

No	Aspek	Kondisi Pada BPPHKP Manado	Analisis	Kesesuaian
1	Penyampaian Perubahan Regulasi	Informasi mengenai perubahan kebijakan maupun regulasi disampaikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi, rapat internal, email, resmi, dan WhatsApp.	Penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi sehingga penyampaian informasi lebih mudah informasi diperoleh secara merata oleh seluruh pegawai.	Informasi dan komunikasi pada BPPMHKP berjalan dengan baik. Namun, kelancaran komunikasi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan karena keterlambatan informasi mengenai dokumen maupun data dapat memperlambat penyelesaian dalam penyusunan laporan keuangan. Kurangnya koordinasi ini merupakan hal yang menghambat proses kinerja penyusunan hingga penyelesaian laporan keusngan. Oleh karena itu, SPIP yang dijalankan sudah sesuai tetapi masih butuh penguatan terhadap ketepatan waktu dan konsistensi dalam penyampaian informasi dan berkomunikasi.
2	Komunikasi AntarBagian	Komunikasi antarbagian dilakukan dengan berkoordinasi langsung melalui Apliasi SAKTI dan Myintress yang membantu untuk membagikan informasi mengenai keuangan, dan koordinasi dengan *user* lain dilakukan menggunakan WhatsApp dan jaringan telepon.	Koordinasi antarbagian sangat diperlukan agar data-data yang akan digunakan dalam laporan keuangan sesuai dan tidak ada kesalahan informasi data. Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai media dan aplikasi keuangan seperti SAKTI dan Myintress.	
3	Kendala dalam Komunikasi	Terdapat kendala pada komunikasi yang ada berupa teknis dilapangan sering menunda penyerahan bukti transaksi yang menyebabkan kegiatan pencatatan sering tertunda, perubahan status aset sering tidak di informasikan, dan kurangnya ruang diskusi sehingga terdapat perbedaan pemahaman mengenai penafsiran dalam pengklasifikasian belanja, dan penyampaian untuk perbaikan pada aplikasi SAKTI yang *error* sering terlambat sehingga penyusunan laporan keuangan terhenti.	Kendala pada komunikasi seperti ketepatan waktu penyerahan bukti transaksi, perubahan status aset yang tidak diinformasikan, dan masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap pencatatan transaksi. Hal tersebut perlu diperbaiki karena dapat menghambat dan mengganggu aktivitas instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.	
4	Mekanisme Koreksi Pelaporan	Kesalahan yang terjadi diperbaiki secara berjenjang mulai dari satker yang melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan data Barang Milik Negara serta dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN, lalu perbaikan yang telah dibuat disampaikan ke KPA untuk disetujui , dan diteruskan ke tingkat wilayah (UAPPA-W) atau Eseleon I (UAPPA-E1) hingga Kementerian/Lembaga.	Adanya mekanisme koreksi pada BPPMHKP Manado yang diterapkan dapat membuat penyajian laporan keuangan tersaji dengan kualitas yang baik, yang mana harus ada kesesuaian seperti data keuangan dengan data barang milik negara (BMN).	

Informasi dan komunikasi pada BPPMHKP Manado telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki sehingga proses penyampaian informasi dan komunikasi dapat berjalan lebih baik. Penyampaian informasi mengenai perubahan kebijakan dan regulasu sudah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi, rapat internal, email, dan WhatsApp. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPPMHKP Manado memanfaatkan seluruh saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi, tetapi dalam setiap informasi yang disampaikan harus ada tindakan lebih lanjut karena informasi yang diterima oleh pegawai masih sering kurang dipahami ketika ada perubahan kebijakan atau regulasi.

Komunikasi antarbagian juga diterapkan antara bagian keuangan dengan unit kerja lain dalam melakukan permintaan data, rekonsiliasi, dan koordinasi tentang proses penyusunan laporan keuangan. Namun, dalam hal komunikasi masih ditemukan adanya kendala seperti keterlambatan informasi bukti transaksi, perbedaan pemahaman dalam mengintepretasi akun, dan penyampaian *error* pada sistem SAKTI sering terlambat sehingga penyusunan laporan keuangan terhambat.

Apaila terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, mekanisme koreksi dilakukan melalui aplikasi SAKTI. laporan belum dapat disahkan ketika terdapat kesalahan dan harus diperbaiki. Namun, ketika masih ditemukan kesalahan setelah laporan keuangan disahkan dapat dikoreksi sesuai dengan ketentuan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

Pemantauan

Tabel 5. Analisis Komponen Pemantauan

No.	Aspek	Kondisi pada BPPMHKP Manado	Analisis	Kesesuaian
1	Pemantauan Rutin	Pemantauan dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda diantaranya, dipantau oleh unit akuntansi tingkat satuan kerja (UAKPA), wilayah (UAPPA-W), Eselon 1 (UAPPA-E1), hingga tingkat kementerian (UAPA) menggunakan aplikasi seperti Myintress dan aplikasi SAKTI KemenKeu, auditor internal yakni Inspektorat Jenderal atau Satuan Pengawasan Intern (SPI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan pihak eksternal sebagai auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Pemantauan rutin ini dilakukan agar seluruh aktivitas dalam penyusunan laporan keuangan tetap terkontrol dan sesuai dengan prosedur. Pemantauan juga dilakukan untuk mencegah risiko-risiko kecurangan yang akan terjadi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari BPPMHKP Manado.	Pemantauan bertujuan untuk mengontrol pengendalian yang diterapkan dan memastikan tetap berjalan sesuai dengan regulasi. Kelemahan yang ada langsung ditindaklanjuti. Adanya pengawasan dari auditor juga sangat mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, berjalanannya pengendalian internal, dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, SPIP yang diterapkan sudah sesuai karena pemantauan secara konsisten dilakukan dengan tindak lanjut yang jelas.
2	Evaluasi Berkala	Evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian internal dilakukan dari pemantauan rutin yang dilakukan setiap hari oleh manajemen pada aktivitas operasional sehari-hari. Evaluasi juga dilakukan oleh audit internal adan audit eksternal. Evaluasi berkala dilakukan setiap 6 bulan sekali atau tahunan menjelang periode baru.	Evaluasi berkala dilakukan untuk membantu apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dengan adanya pihak internal dan eksternal tentu sangat membantu dalam melakukan penilaian terhadap pengendalian internal.	
3	Tindak lanjut temuan	Tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan kelemahan pada pengendalian internal satuan kerja melalui penyusunan rencana perbaikan, mengimplementasikan rekomendasi auditor, serta melaporkan perkembangan atas penyelesaiannya kepada aparat pengawas	Tindak lanjut yang dilakukan BPPMHKP Manado menunjukkan bahwa hasil pengawasann tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah tetapi menunjukkan sikap untuk bergerak memperbaiki jika terdapat kelemahan.	

4	Audit dan Pemeriksaan	Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP telah dilakukan pada tahun 2025 dan telah ditindak lanjuti. Hasilnya telah di *upload* di aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Rekomendasi) KKP.	Audit rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menjadi faktor penting dalam mendorong keefektivitasan pengendalian internal pada BPPMHKP Manado. sikap transparansi pun di terapkan BPPMHKP Manado dengan mengunggah rekomendasi audit dan hasil penerapan.	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, komponen pemantauan yang diterapkan pada BPPMHKP Manado telah berjalan dengan baik. Adanya pemantauan yang dilakukan setiap hari dan evaluasi tersendiri dari berbagai pihak yang memiliki fungsi pengawasan masing-masing.

Pemantauan yang dilakukan secara bertahap dari tingkat satuan kerja hingga tingkat kementerian/lembaga melalui aplikasi SAKTI dan Myintress dalam mendukung proses pengamatan dan pemantauan data.

Selain itu, terdapat pengawasan dari Inspektorat Jenderal/SPI, KPPN, dan BPK. Inspektorat melakukan pemantauan lewat pendampingan pada saat penyusunan laporan keuangan, KPPN bertugas dalam memantau kualitas data, dan proses rekonsiliasi, dan BPK melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan dan penerapan pengendalian pada BPPMHKP Mando.

Adapun ketika terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal, langsung diperbaiki sesuai dengan rekomendasi auditor. Setelah diperbaiki, hasil perbaikan tersebut di unggah ke aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Rekomendasi) guna menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pada BPPMHKP Manado.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kesimpulan atas yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada penyusunan laporan keuangan di BPPMHKP Manado sudah berjalan dengan sesuai. Dari lingkungan pengendalian yang diterapkan dengan memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masing yang terstruktur, pengendalian risiko denngan identifikasi risiko dan pencegahan risiko yang memadai, kegiatan pengendalian yang memiliki prosedur dan tersistem, informasi dan komunikasi atas perubahan regulasi dan koordinasi antarbagian yang dijalankan, serta pemantauan yang diterapkan dengan adanya evaluasi berkala dan melibatkan beberapa pihak baik auditor internal maupun eksternal.
2. Penerapan SPIP pada BPPMHKP Manado juga masih terdapat kelemahan seperti kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan secara merata agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Lalu, Identifikasi risiko yang diterapkan sudah baik namun penanganan risiko tersebut perlu diperkuat dan dijalankan secara berkelanjutan. Kemudian, pada unsur informasi dan komunikasi yang harus ditingkatkan karena sering terjadi miskomunikasi antarbagian yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada penyusunan laporan keuangan pada BPPMHKP Manado, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi BPPMHKP Manado

   BPPMHKP Manado diharapkan untuk mempertahankan sistem pengendalian internal yang telah dijalankan secara efektif khususnya lingkungan pengendalian yang jelas dan terstruktur, serta mempertahankan kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Tetapi, untuk unsur yang lain perlu ditingkatkan, yaitu melakukan identifikasi dan evaluasi risiko secara berkelanjutan, melakukan peningkatan terhadap kompetensi pegawai, memperkuat

koordinasi antarbagian, meningkatkan ketepatan waktu dalam penyerahan dokumen transaksi, dan pemahaman terhadap perubahan regulasi diperhatikan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat memperluas objek penelitian atau menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis secara lebih spesifik terhadap salah satu unsur SPIP, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait SPIP dan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan (Ai)

Penulis menggunakan ChatGPT untuk penulisan karya tulis ilmiah/skripsi. Penulis telah meninjau dan memverifikasi hasil tersebut serta bertanggung jawab penuh atas manuskrip akhir.

Konflik Kepentingan

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan atas setiap hubungan finansial, institusional, personal, atau hubungan lain yang berpotensi memengaruhi penelitian atau publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A Heinrich1, A. P. 2. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana*. *3*(2), 411–424.

Alouw, J. G. E., Wangarry, A. R., & Santie, J. K. (2025). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Atas Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, *1*(September), 475–480.

Artedi, C., & Trisyanto Surya, R. (2022). Pengaruh SPIP dan Software Aplikasi SIMDA BMD Terhadap Kualitas Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, *2*(2), 152–163. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3394

Deiana Suherlan, Mulyandani, V. C., & Citra, V. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, *2*(3), 258–264. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4131

Desti, A., & Halim, A. (2021). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman*.

Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *02*(01), 67–87.

Muslimah, W., Tuafik, T., & Rusli. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, *18*(1), 1–15.

Purwita Sari, F. Y. S. (2021). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah. *Edunomika*, *05*(02), 934–940.

Siringoringo, V. R., Fadhilah, U. A., Rizal, M., & Ervinasari, B. (2024). Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1).